

DINAMIKA PERDAGANGAN SENJATA RINGAN INDONESIA DI KANCAH GLOBAL PADA TAHUN 2014-2019

Muhammad Rizki Yusro¹, Sigid Harimurti²

^{1&2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung
Koresponden E-mail: muhammad.rizki@unpas.ac.id

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v5i1.5978

Abstract

The purpose of this article is to analyze the dynamics of Indonesia in the international arms trade. The arms trade continues to show a gradual increase driven by the economic interests of each country in addition to security interests. Arms trade is an important factor in its contribution to economic growth through exports and imports of defense equipment, although it is interesting to know how the dynamics of Indonesia's arms trade in the global arena in the military industry can facilitate Indonesia's main goal in international arms trade, namely as a leading arms supplier in the world. The research method used in this study is a qualitative method. In conducting this research in order to facilitate the analysis, the author uses the concept of the Military Industrial Complex with a writing method in the form of descriptive analysis and in the process of analyzing and interpreting the data used the process of data reduction and drawing conclusions. At the end of this article, the author finds that the dynamics of Indonesia's activeness in the global arms trade is still dominated by its role as an arms importer, although over time, Indonesia continues to show developments regarding the implementation of its goal to become the world's leading arms exporter. However, despite these facts, there are several main problems that need to be faced by Indonesia, namely those related to the need for structural changes in the three main pillars of the defense industry, the allocation of the defense budget in the field of research and development, and collaboration in developing the defense industry.

Keywords: *Arms Trade, Military Industrial Complex, Universal Defense Strategy*

Abstrak

Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis perihal dinamika Indonesia dalam perdagangan senjata internasional. Perdagangan senjata terus-menerus memperlihatkan peningkatan secara gradual yang didorong oleh kepentingan ekonomi tiap negara selain daripada kepentingan keamanan. Perdagangan senjata jadi faktor penting dalam sumbangsuhnya terhadap pertumbuhan ekonomi lewat ekspor dan impor alutsista, kendati demikian menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana dinamika perdagangan senjata Indonesia di kancah global dalam lingkup industri militer apakah dapat memfasilitasi tujuan utama Indonesia dalam perdagangan senjata internasional yaitu sebagai pemasok senjata terkemuka di dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini agar mempermudah analisis,

penulis menggunakan konsep *Military Industrial Complex* dengan metode penulisan berupa deskriptif analisis dan dalam proses Analisa dan interpretasi data digunakan proses reduksi data dan penarikan kesimpulan. Diakhir artikel ini, penulis menemukan bahwa dinamika keaktifan Indonesia dalam perdagangan senjata global masih didominasi oleh peran sebagai importir senjata, meskipun dengan seiring berjalannya waktu, Indonesia terus menunjukkan perkembangan perihal pengimplementasian tujuan untuk menjadi negara eksportir senjata terkemuka di dunia. Namun, terlepas dari fakta tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu dihadapi Indonesia yakni terkait dengan perlu adanya perubahan structural dalam tiga pilar utama industry pertahanan, alokasi anggaran pertahanan di bidang penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi dalam melakukan pengembangan industry pertahanan.

Kata Kunci: Perdagangan Senjata, *Military Industrial Complex*, Strategi Pertahanan Semesta

PENDAHULUAN

Di era kontemporer ini, indikator-indikator di dalam kapabilitas sistem pertahanan dan kapabilitas industri pertahanan memiliki perbedaan. Kapabilitas sistem pertahanan ditujukan untuk menggenapi kedaulatan negara. Sedangkan kapabilitas industri pertahanan cenderung bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui perdagangan senjata

Industri pertahanan merupakan produsen berbagai kebutuhan sistem pertahanan yang memiliki nilai bisnis sangat tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*), dari tahun 1950 sampai tahun 1980-an, kegiatan transfer kebutuhan sistem pertahanan selalu mengalami peningkatan. Dekade 1980-an sampai dengan berakhirnya Perang Dingin telah sangat berpengaruh terhadap penurunan transfer senjata global (Aude Fleurant et al., 2016). Meski mengalami penurunan karena konflik terbuka secara frontal sudah jarang terjadi, namun bisnis perdagangan senjata memiliki nilai keuntungan yang sangat menjanjikan. Nilai dari transfer secara global berbagai senjata api, kendaraan perang, pesawat, kapal, dan kebutuhan sistem pertahanan lain pada tahun 2015 diperkirakan

mencapai \$28 miliar dolar AS (Sumarlan et al., 2019). Pada tahun 2011-2015, volume transfer senjata utama dan kebutuhan sistem pertahanan global lebih tinggi 14 persen dibandingkan tahun 2006-2010. Lima eksportir terbesarnya adalah Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis dan Jerman. Sedangkan untuk lima importir terbesarnya adalah India, Arab Saudi, Cina, Uni Emirat Arab dan Australia. (Aude Fleurant et al., 2016).

Indonesia melalui strategi perdagangan senjatanya sedang berupaya untuk menjadi pemasok pertahanan global yang berdaya saing. Di pasar global produsen senjata menyediakan dan menjual berdasarkan beberapa klasifikasi; Senjata api ringan, ringan, sedang dan berat (Schroeder, 2018). Adapun Senjata api ringan produk In dalam hal ini PT Pindad donesia memiliki jenis dan spesifikasi yang cukup *rigid*. Klasifikasi senjata ringan berdasarkan tipe dan jenisnya yang diproduksi oleh PT. Pindad. PT. Pindad memproduksi berbagai jenis dan tipe dengan banyak varian. Namun penulis mengambil salah satu varian senjata yang diproduksi. Misalnya senjata ringan pada jenis senjata rifles mengambil tipe *SS2-V5 A1. Sniper rifles; SPR-4. Machine Guns; SM-5 KAL. 12.7 MM. Granade launcher SPG1-V3 KAL. 40 MM. Mortir; MO-3*

KAL. 81 MM. Pistols; MAG4. Shotguns; SG-1 12 GAUGE. Submachine Guns; PM3. Hal tersebut merupakan jenis senjata ringan yang diperdagangkan oleh PT. Pindad. Kondisi perdagangan senjata yang diproduksi PT. Pindad untuk masuk ke pasar global tentunya akan berhadapan dan bersaing dengan produsen-produsen besar. Prospek penjualan senjata PT. Pindad sejauh ini masih perlu adanya pembenahan.

Hasil pendapatan dari produktivitas senjata yang diproduksi oleh PT. Pindad dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini terlihat bagaimana pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp. 186 M disusul dengan hasil pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 179 M. Kemudian pada tahun 2016 hasil pendapatan produksi kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 199 M. Peningkatan hasil produksi senjata kembali mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 243 M dan Rp. 359. Dalam kurun dua tahun tersebut merupakan kenaikan yang cukup fantastis namun hal ini tidak membuat tahun berikutnya mengalami kenaikan yang sama. Terlihat pada tahun 2019 hasil pendapatan produksi senjata turun menjadi Rp. 303 M.

Alokasi anggaran pertahanan Indonesia di bidang penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan industri pertahanan dalam menghasilkan produk yang mandiri dan berkualitas masihlah kurang. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya data ekspor senjata yang dilakukan oleh Indonesia. Alih-alih melakukan ekspor senjata, Indonesia justru lebih banyak melakukan impor khususnya jenis senjata api ringan.

Indonesia masih mengalami hambatan struktural terkait kebijakan ekspor senjata karena mekanismenya yang terpaku pada konsep pemerintah ke pemerintah dan perizinan dalam birokrasi yang tidak memperbolehkan industri

pertahanan melakukan impor bahan baku dalam jumlah yang besar padahal industri pertahanan Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri.

Mengacu pada temuan dalam penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian lanjutan dalam artikel ini yang berusaha menguraikan dinamika perdagangan senjata api ringan Indonesia di kancah global dan menganalisis strategi yang dapat menunjang dan mendongkrak produk senjata api ringan yang dimiliki Indonesia agar mampu berdaya saing dan diperhitungkan di kancah global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut peneliti lebih sesuai dengan topik penelitian melalui proses interpretasi data dalam melihat peran dari objek penelitian (Creswell, 2007). Lebih lanjut, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif jenis Studi Kasus yang Pokok utamanya menggunakan sampling purposeful, seterusnya akan dianalisis secara holistik atas kasus tersebut secara detail dalam pola-pola, substansi dan lokasi dimana kasus itu terjadi (Creswell, 2009).

Analisis dan interpretasi data akan menggunakan proses reduksi data, data apa saja yang didapat dan conclusion drawing (Miles & Huberman, 1994). Tahapan-tahapannya antara lain: (1). Pengumpulan data mentah; (2). Reduksi data; (3). *Display data*; (4). Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

HASIL DAN DISKUSI

Kondisi Perdagangan Senjata Indonesia, Jika melihat Volume transfer senjata internasional yang terus meningkat pada periode 2014-2018 senyatanya masih didominasi oleh beberapa negara yang diantaranya adalah Amerika Serikat

(36%), Rusia (21%), Perancis (6,8%), Jerman (6,4%), dan Cina (5,2%). Sementara itu untuk sisi import didominasi oleh beberapa importir senjata terbesar yang diantaranya yaitu Arab Saudi (12%), India (9,5%), Mesir (5,1%), Australia (4,6%) dan Algeria (4,4%) (Wezeman et al. 2019:2).

Dinamika transfer senjata yang semakin meningkat, melegitimasi konsep *Military-industrial complex* yang secara garis besarnya mengutarakan bahwa meskipun jumlah konflik di dunia semakin berkurang, namun industri militer tetap produktif melalui investasi pada penelitian dan pengembangan untuk melakukan komersialisasi agar tetap memperoleh keuntungan (Edmonds 1999: 115). Hal ini tentunya tidak terlepas dari hubungan interdependensi antara berbagai kelompok sepertihalnya antara kelompok birokrasi yang diwakili oleh eksekutif dan legislatif dengan kelompok kepentingan yang diwakili oleh industri militer (khususnya industri militer swasta). Untuk menjadikan siklus transfer senjata menjadi suatu entitas yang mengandung nilai lebih bagi siklus ekonomi suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik internasional tengah menghadapi berbagai konflik yang menghasilkan eskalasi antara negara terkait seperihalnya sengketa perbatasan Laut Cina Selatan yang mendorong ranah kawasan yang terkait dijadikan sebagai momentum untuk manuver geopolitik berbagai negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut, namun yang harus menjadi titik fokus adalah perihal eskalasi sengketa perbatasan tersebut turut serta menjadi faktor dalam meningkatkan volume transfer senjata internasional (Pudjiastuti Nuke 2019:118).

Kendati demikian, aliran senjata mengalami penurunan ke beberapa wilayah diantaranya Afrika, Amerika,

Asia, dan Oseania serta Eropa. Peningkatan aliran transfer senjata mengalami peningkatan 87 persen antara 2009-2013 dan 2014-2018 ke Timur tengah. Meskipun wilayah Asia mengalami volume aliran senjata yang terhitung menurun, tidak sedikit negara Asia yang memiliki partisipasi yang tinggi terhadap dinamika transfer senjata di dunia, salah satu contoh yang kongkret adalah negara Indonesia.

Indonesia menjadi negara yang cukup dipertimbangkan dalam dinamika perdagangan senjata secara keseluruhan baik senjata kecil maupun besar, meskipun keaktifan Indonesia dalam dinamika perdagangan Indonesia masih didominasi oleh kegiatan impor. Indonesia dalam periode 2014-2018 mendapati urutan posisi ke 12 sebagai negara impor terbesar setelah Pakistan di urutan ke 11 dan sebelum Turki di urutan 13 (Wezeman et al. 2019:6).

Fakta bahwa Indonesia adalah negara importer terbesar di kawasan Asia Tenggara untuk lingkup perdagangan senjata dengan pemasok utama dari Inggris sebesar 60 persen dari keseluruhan jumlah impor senjata Indonesia, disusul oleh Amerika Serikat dengan 18 persen dan Belanda dengan 13 persen. Namun selain dari tiga mitra terbesar tersebut, Indonesia juga menjadi negara importir senjata dari Korea Selatan, Switzerland, Australia serta Brazil. Dengan dorongan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, Indonesia dalam periode 2014-2018 mengalami peningkatan impor senjata jika dibandingkan dengan periode 2009-2013, peningkatan dari 2009-2013 hingga 2014-2018 tercatat sebesar 86 persen (Wezeman et al. 2019:6).

Namun dalam tenggat waktu 2019 terjadi perubahan yang signifikan dalam perdagangan senjata internasional, terkhususnya dalam partisipasi Indonesia terhadap dinamika transfer senjata

internasional. Posisi Indonesia sebagai negara importir terbesar di lingkup internasional menurun menjadi urutan ke 17 (Wezeman et al. 2020:6).

Terhitung Indonesia mengalami penerunan kegiatan impor pada periode waktu 2015-2019 dibandingkan dengan periode 2010-2014 dengan kisaran angka penurunan 4,6. Serta ada perubahan dalam pemasok senjata utama untuk Indonesia yang didominasi oleh Amerika Serikat dengan pasokan 20 persen dari keseluruhan impor senjata Indonesia, serta diikuti oleh pasokan transfer senjata dari Belanda sebesar 16 persen dan Korea Selatan dengan kisaran angka sebesar 16 persen. Untuk beberapa pemasok senjata lainnya masih oleh pemasok yang sama dengan periode 2014-2018 yaitu Australia, Brazil dan beberapa negara pemasok senjata lainnya. Namun di sisi lain ada perkembangan dari sisi ekspor Indonesia yang berhasil tercatat sebagai pemasok senjata kedua terbesar untuk negara importir terbesar senjata urutan ke 35 yaitu negara Filipina dengan ekspor senjata sebesar 21 persen dari keseluruhan impor Filipina (Wezeman et al. 2020:6). Hadirnya Indonesia dalam partisipasi ekspor senjata menuju Filipina menjadi suatu pencapaian tersendiri dalam segi ekonomis, sebab hal ini membuktikan bahwa Indonesia telah mulai menunjukkan partisipasi yang positif di lingkup perdagangan senjata internasional sebagai eksportir senjata.

Terlepas dari data perihal perdagangan senjata secara keseluruhan (baik senjata kecil maupun besar), dalam perdagangan senjata secara spesifik senjata kecil mengutip penelitian Small Arms Survey (SAS) yang mengutarakan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu dari lima importir senjata kecil terbesar di dunia setiap tahun sejak 2014 (Michael Picard 2019:14). Dalam aspek senjata kecil, pada 2016 tercatat Indonesia masuk dalam lima besar importir terbatas di

dunia, bersanding dengan Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada dan Jerman (Picard, Holtom, and Mangan 2019:24).

Indonesia dilaporkan mengalami perubahan yang paling signifikan dalam nilai impor sejak 2015. Tercatat dari laporan UN Comtrade, Indonesia pada 2015 anggaran yang dikeluarkan pada 2015 hanya senilai 173 juta dolar, namun pada 2016 mengalami peningkatan yang signifikan yang mencapai angka 281 juta dolar untuk impor senjata kecil. Perubahan nilai yang signifikan dari Indonesia dalam impor senjata kecil (ringan) sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar ketiga di dunia, setelah Arab Saudi dan Amerika Serikat. Pertumbuhan impor Indonesia ini hampir seluruhnya terdiri dari senjata api militer, yang nilainya meningkat sebesar 101 juta dolar sejak 2015 dan mewakili 85 persen dari impor Indonesia tahun 2016. Sebesar 60 persen dari impor senjata kecil oleh Indonesia berasal dari Brasil, sementara dua pemasok terbesar Indonesia berikutnya, Cina dan Prancis, masing-masing hanya menyediakan delapan persen. Hampir semua impor Indonesia dari Brasil adalah senjata api militer. Secara global, Indonesia merupakan importir senjata api militer terbesar pada tahun 2016 (Picard, Holtom, and Mangan 2019:25).

Terlepas dari sisi keaktifan Indonesia dalam lingkup impor senjata ringan, senyatanya Indonesia pun tengah berupaya untuk menjadi eksportir senjata ringan bersamaan dengan enam negara lainnya. Riset Trade Update mengidentifikasi tujuh negara Asia Tenggara yang memproduksi senjata ringan yaitu; Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Indonesia memperlihatkan langkah-langkah untuk melengkapi militer nasional dan badan-badan keamanan sambil meminimalisir impor, meskipun masih berfokus dalam produksi

senjata kecil berlisensi atau varian senjata dalam negeri yang diproduksi di negara lain seperti senapan serbu SS2 PT. Pindad yang didasarkan pada FNC FN Herstal. Meskipun Indonesia telah melakukan upaya memperluas industri dalam negeri dan mencapai pengadaan yang lebih besar, faktanya Indonesia masih bergantung pada impor (Picard, Holtom, and Mangan 2019:47).

Sehubungan dengan kondisi Indonesia sebagai eksportir senjata, Indonesia telah menyatakan minatnya untuk memperluas kemampuan produksi senjata kecil dan amunisi domestik, hal ini berkaitan dengan upaya modernisasi militer dan rencana pengadaan. Tercatat Indonesia mulai menggunakan industri senjata dalam negeri sebagai sarana untuk pembangunan ekonomi dan untuk mencapai kemandirian dalam pengadaan pertahanan. Hal ini terbukti dengan PT.Pindad sebagai kepemilikan negara, yang memasok senjata kecil ke militer dan sektor keamanan Indonesia telah dikembangkan kembali dengan investasi negara dalam fasilitas produksi baru dan membangun kemitraan produksi internasional (Picard, Holtom, and Mangan 2019:49). Selaras dengan upaya tersebut, Indonesia telah memiliki orientasi untuk meningkatkan daya ekspor serta menjadi pemasok senjata terkemuka (Picard, Holtom, and Mangan 2019:52).

Orientasi untuk menjadi pemasok senjata terkemuka mulai diaplikasikan oleh Indonesia, Khusus perkembangan industri pertahanan Indonesia yang diwakili oleh PT. PAL, PT. Pindad dan PT. DI (Dirgantara Indonesia), selama kurun waktu 2015-2018 telah menunjukkan kemajuan berarti. Total ekspor ketiga BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini mencapai \$280.5 juta dolar AS dengan rincian sebagai berikut PT. PAL, sebesar \$86.9 juta dolar AS dari ekspor dua unit Kapal *Strategic Sealift*

Vessel ke Filipina. PT. Pindad, sebesar \$32.6 juta dolar AS dari ekspor amunisi dan senjata, dan PT. DI, sebesar \$161 juta dolar AS dari ekspor berbagai produk pesawat terbang baik *Fixed Wing* maupun *Rotary Wing*. Sedangkan untuk kinerja penjualan industri pertahanan ke dalam negeri melalui skema anggaran Pengadaan Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp 4.5 triliun yang terdistribusi untuk Mabes TNI sebesar Rp 180.4 miliar, TNI AD sebesar Rp 1.19 triliun, TNI AL sebesar Rp 1.29 triliun, dan TNI AU sebesar Rp 1.83 triliun (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI 2018).

Perkembangan perihal ekspor senjata dari Indonesia tidak terlepas dari tujuan Indonesia untuk menjadi eksportir/pemasok persenjataan yang dominan dalam dinamika perdagangan senjata dunia, namun di sisi lain senyatanya mekanisme ekspor senjata di Indonesia masih mengalami pelbagai keterhambatan dalam aspek penelitian dan pengembangan yang menghasilkan kurang optimalnya partisipasi Indonesia dalam dinamika perdagangan senjata internasional, diantaranya adalah mekanisme ekspor senjata yang masih terpaku pada konsep pemerintah ke pemerintah (*government to government*), bahan baku yang masih bergantung pada negara lain, kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan untuk membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak sebagai stok persediaan, serta mekanisme birokrasi yang masih mengadopsi sistem *Up to Bottom* (Sumarlan et al. 2019:53-55).

Terlebih hambatan Indonesia adalah bahwa mekanisme ekspor senjata yang masih terpaku pada konsep pemerintah ke pemerintah berdampak pada sempitnya ruang manuver dalam memasarkan produk yang dimiliki. Mekanisme ini secara otomatis tidak menggunakan pihak ketiga atau broker

untuk menawarkan produk-produk yang dimiliki sehingga segala kegiatan promosi hanya dilakukan oleh pemerintah, baik itu melalui diplomasi pertahanan, safari promosi senjata, ataupun mengikuti perlombaan.

Ditambah lagi, terdapat kebijakan pemerintah yang tidak mengizinkan industri pertahanan Indonesia untuk membeli bahan baku dari luar negeri dalam jumlah besar padahal masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri dan kurang mendorong investasi di bidang penelitian juga pengembangan. Sebagai contoh, PT Pindad memiliki kapasitas produksi senjata sekitar 50.000 pucuk senjata. Akan tetapi produksinya hanya rata-rata 4000-5000 per tahun. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri dan ketentuan produksi yang harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan melalui penandatanganan kontrak yang tentunya membuat PT Pindad kesulitan melakukan manajemen produksi karena tidak boleh membeli bahan baku dalam jumlah banyak sekaligus (Sumarlan et al. 2019:60). Hal ini nampak jelas menjadi hambatan secara struktural yang menghasilkan proses pengadaan dan perencanaan tersendat. Hal ini sekaligus menjadi cerminan terhadap kurang bersinerginya industri pertahanan dan Kementerian Pertahanan dengan instansi terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Perdagangan.

Namun faktanya, hambatan Indonesia dalam lingkup perdagangan senjata global berkaitan dengan sejarah industri pertahanan Indonesia sendiri. Rekam jejak dinamika industri pertahanan senyatanya mendapatkan berbagai hambatan, tercatat dari tahun 2000-an Indonesia masih kesulitan dalam memberdayakan aspek industri pertahanan sebagai produsen persenjataan dan segala kebutuhan

pertahanan, hingga tahun 2007 Indonesia masih tidak memperlihatkan keseriusan dalam pengembangan industri pertahanan dengan ditandai oleh indikator alokasi APBN pertahanan tahunan yang belum menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2008 alokasi APBN dalam sektor pertahanan negara masih berada pada prioritas urutan keempat di bawah fungsi pelayanan umum, pendidikan, dan ekonomi (Pahlawan and Setya 2015: 2).

Alokasi dari anggaran pertahanan Indonesia belum bisa dioptimalkan dengan baik karena selain jumlahnya yang masih tergolong kecil, alokasi anggaran juga masih menghadapi hambatan struktural, yaitu kepentingan belanja rutin dan belanja modal/anggaran pembangunan lebih diprioritaskan dibandingkan anggaran lainnya. Tentunya hal ini membuat investasi untuk menunjang penelitian dan pengembangan menjadi kurang optimal. Selain itu, anggaran belanja rutin merupakan sektor alokasi yang relatif kurang fleksibel, sedangkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi (Kennedy 2017: 70). Persoalan ini juga menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam memproduksi persenjataan dan segala kebutuhannya yang mampu berdaya saing secara global.

Maka dinamika internal Indonesia sendiri masih bedialektika terhadap hambatan yang ada untuk bisa memfasilitasi tujuan utama Indonesia dalam perdagangan senjata internasional yaitu sebagai pemasok senjata terkemuka di dunia, hal ini berbanding lurus dengan peran Indonesia dalam dinamika perdagangan senjata internasional yang kurang optimal, dengan bukti bahwa Indonesia lebih cenderung mejadi negara pengimpor senjata dari negara maju.

Namun dalam aspek ekspor senjata Indonesia belum bisa menghasilkan partisipasi yang aktif sebagai eksportir senjata internasional.

Indonesia telah memperlihatkan upaya untuk membangun siklus yang positif terkait pengembangan produsen alutsista semisal PT Pindad yang mulai difokuskan untuk menjadi produsen senjata yang berdaya saing global, meskipun data yang terkemuka menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan produksi masih bergantung pada aktifitas impor dari negara maju. Maka hambatan-hambatan yang terjadi baik internal maupun eksternal dari Indonesia semestinya menjadi tolak ukur untuk mencipta pelbagai strategi demi tercapainya Indonesia sebagai eksportir senjata terkemuka di dunia.

Selanjutnya terkait Rancangan Strategi Perdagangan Senjata Ringan Indonesia yang Mampu Berdaya Saing di Kancah Global. Strategi yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk mengatasi berbagai hambatan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki di dalam kegiatan perdagangan senjata global khususnya jenis senjata ringan adalah strategi pertahanan semesta sebagai konsep yang mampu memberikan totalitas dan sinergisitas kekuatan nasional secara riil yang melibatkan seluruh komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan baik dari kalangan militer ataupun dari kalangan sipil sehingga industri pertahanan yang kuat dan mandiri serta memiliki daya saing secara global dapat terwujud.

Penulis membaginya menjadi tiga jenis strategi yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu strategi untuk melakukan perubahan struktural dalam tiga pilar utama industri pertahanan, alokasi anggaran pertahanan di bidang penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi

dalam melakukan pengembangan industri pertahanan.

Pembenahan secara struktural menjadi yang utama untuk menciptakan transformasi kebijakan antar instansi/lembaga yang berkaitan dengan mekanisme ekspor, pengadaan bahan baku, dan promosi senjata agar dapat berjalan dengan optimal. Lalu, perlu adanya fokus terhadap alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan serta kolaborasi dengan lembaga riset dan penelitian, perguruan tinggi, dan industri swasta lainnya untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Sebagai tambahan, dapat juga dilakukan pemanfaatan berbagai forum regional, bilateral ataupun multilateral yang dapat menguntungkan industri pertahanan untuk safari promosi produk senjata yang dimiliki.

Konsep *the iron triangel* yang pernah dijelaskan oleh Rianne Rozemarijn Hartemink menganalogikan hubungan interdependensi (kesalingtergantungan) antara birokrasi yang diwakili oleh eksekutif dan legislatif, bekerja sama dengan kelompok kepentingan yang diwakili oleh industri militer (baik BUMN ataupun swasta) menjadi tiga elemen utama dalam keamanan nasional yang terkait langsung terhadap produktifitas industri pertahanan. Masing-masing mewakili angkatan bersenjata atau tentara nasional, institusi pemerintah di bidang pertahanan, serta kontraktor persenjataan yang dalam hal ini berada di bawah BUMN. Karena dinamika isu keamanan yang telah berubah dari isu keamanan tradisional menjadi keamanan non-tradisional, maka produktifitas industri pertahanan lebih terfokus pada penelitian dan pengembangan untuk menciptakan modernisasi alutsista baik itu untuk kepentingan sistem pertahanan

negaranya, ataupun untuk kepentingan perdagangan senjata yang dapat menjadi keuntungan ekonomi.

Untuk menjalankan mekanisme ekspor persenjataan, industri pertahanan dan Kementerian Pertahanan harus melakukan sinergisitas dengan instansi terkait lainnya, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, serta harus melakukan koordinasi dengan instansi lainnya jika memang ada kebutuhan lain. Sejauh ini, hal inilah yang masih menjadi hambatan struktural. Sebagai contoh, PT Pindad memiliki kapasitas produksi senjata sekitar 50.000 pucuk senjata. Akan tetapi produksinya hanya rata-rata 4000-5000 per tahun. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari ketergantungan terhadap bahan baku dari luar negeri dan ketentuan produksi yang harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan melalui penandatanganan kontrak yang tentunya membuat PT Pindad kesulitan melakukan manajemen produksi karena tidak boleh membeli bahan baku dalam jumlah banyak sekaligus (Sumarlan et al. 2019:60)

Mekanisme perdagangan senjata yang dilakukan oleh Indonesia masih mengacu pada konsep pemerintah ke pemerintah sehingga membuat jalannya perizinan dalam perdagangan menjadi lambat. Secara tidak langsung hal ini juga berpengaruh terhadap produktifitas industri pertahanan ketika membuat senjata. Ditambah lagi, mekanisme seperti ini tidak menggunakan pihak ketiga untuk membantu melakukan promosi dan membuat ruang gerak dalam memperkenalkan produk-produk persenjataan menjadi terbatas.

Sebagaimana diamanatkan dalam Buku Putih Pertahanan tahun 2014, industri pertahanan yang kuat dan mandiri merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan industri pertahanan

dalam negeri, kemandirian sarana pertahanan, dan kerjasama dalam pengembangan industri pertahanan. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja industri pertahanan yang mampu menghasilkan produk unggulan khususnya produk senjata api ringan yang nantinya diekspor ke berbagai negara. Dikarenakan mekanisme perdagangan senjata yang dilakukan masih terpaku pada konsep pemerintah ke pemerintah, maka salah satu cara untuk mengefisiensikan birokrasi dan perizinan dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak lain seperti industri swasta, lembaga riset dan penelitian, dan perguruan tinggi yang telah turut serta melakukan penelitian dan pengembangan bersama (ataupun instansi lainnya yang turut terlibat dalam mekanisme ekspor senjata).

Di satu sisi, industri pertahanan Indonesia masih mengalami ketergantungan bahan baku dari luar negeri dan di sisi lain, Kementerian Pertahanan tidak mengizinkan industri pertahanan untuk mengimpor bahan baku dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadi hambatan tersendiri untuk melakukan produksi dengan jumlah besar karena PT Pindad sebagai produsen persenjataan khususnya senjata api ringan kesulitan untuk melakukan manajemen produksi yang biasanya menyimpan stok bahan baku sebagai cadangan ketika terdapat permintaan dari pasar yang cukup besar (Sumarlan et al. 2019:60-62). Jika mekanisme ini memperbolehkan industri pertahanan untuk melakukan impor dalam jumlah besar tanpa izin yang berbelit-belit, maka efisiensi kegiatan produksi atas respon pasar pun dapat berjalan baik.

Perubahan secara struktural yang bertahap harus dimulai dari pembenahan dalam *the iron triangel* atau tiga pilar utama industri pertahanan meliputi berbagai instansi yang terkait dengan

produktifitas industri pertahanan serta fokus dalam penelitian dan pengembangan agar dapat menjadi strategi yang mampu menunjang dan mendongkrak perdagangan senjata Indonesia di kancah global. Jika Indonesia ingin produk pertahanannya diminati oleh banyak negara, maka hal yang paling utama dan mendasar untuk dilakukan adalah meningkatkan kualitas produknya. Belum lagi, permasalahan tentang spesifikasi dan suku cadang setiap alat yang berbeda-beda membuat industri pertahanan Indonesia masih bergantung pada komponen dari luar negeri.

Alokasi Anggaran Pertahanan di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Produktifitas industri pertahanan telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan yang mengutamakan penggunaan produk industri pertahanan dalam negeri dan menjabarkan kebijakan untuk perdagangan senjata (Ridon Manik, Hipdizah 2020: 35). Dalam pasal 4 UU tersebut, salah satu tujuan penyelenggaraan industri pertahanan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Sumarlan et al. 2019:48). Namun, karena masih terdapat keterbatasan, Indonesia masih membutuhkan bantuan dari negara lain untuk mengembangkan produk persenjataannya.

Dikarenakan selalu ada keterkaitan antara anggaran pertahanan dengan perekonomian oleh sebab kedua hal ini memang bersifat komplementer, maka peningkatan produksi nasional berbanding lurus dengan meningkatnya perekonomian nasional. Perekonomian nasional yang semakin berkembang dan maju akan meningkatkan kemampuan membayar pajak bagi setiap warga negara sebagai kewajibannya. Dan tentunya hal ini dapat berpengaruh terhadap anggaran pertahanan yang memadai.

Tahun 2009 hingga 2013 menunjukkan pengeluaran militer yang terus-menerus meningkat dari angka US\$ 3.304 miliar- US\$ 8.384 miliar. Pada tahun 2014, terjadi penurunan menjadi US\$ 6.531 namun tidak lebih rendah dibanding tahun 2012. Peningkatan terjadi kembali di tahun 2017 sebesar US\$ 8.798 miliar dan menjadi jumlah pengeluaran paling besar sejauh ini (World Bank 2019).

Alokasi anggaran yang tidak teralokasi dengan baik membuat investasi yang dikhususkan untuk menunjang penelitian dan pengembangan menjadi kurang optimal, di sisi lain alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi (Kennedy 2017: 70). Persoalan ini juga menjadi hambatan tersendiri bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam memproduksi persenjataan dan segala kebutuhannya yang mampu berdaya saing secara global.

Perlu diingat bahwa pengeluaran militer dan produksi militer merupakan dua hal yang berbeda. Pengeluaran militer digunakan untuk kebutuhan sistem pertahanan sedangkan produksi militer cukup erat kaitannya dengan penelitian dan pengembangan untuk kebutuhan industri pertahanan dalam melakukan perdagangan senjata. Salah satu hal yang belum dilakukan oleh Indonesia adalah mengalokasikan anggaran pertahanan sesuai dengan skala prioritasnya.

Salah satu hal yang belum dilakukan oleh Indonesia adalah mengalokasikan anggaran pertahanan sesuai dengan skala prioritasnya. Berbeda dengan banyak negara maju yang industri pertahanannya berada di sektor privat (swasta), industri pertahanan di negara berkembang masih banyak berada di sektor BUMN. Ketika anggaran pertahanan diturunkan, negara-negara

yang industri pertahanannya maju (khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa), berusaha melakukan restrukturisasi dan konsolidasi industri pertahanan agar mampu berusaha lebih untuk mengeksport persenjataan di luar wilayah mereka (Dilahwansa, Bhakti, Pedrason 2019: 4). Namun, kelemahan dari industri pertahanan negara berkembang yang masih didominasi BUMN adalah kurangnya inovasi dan teknologi. Hal ini menjadi fakta yang menunjukkan bahwa produk persenjataan Indonesia untuk mendukung kemampuan pertahanan dan keamanan masih memperoleh hambatan karena pendanaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan masih kurang.

Menurut Emile Benoit, seorang ekonom klasik, dalam analisisnya ia menjelaskan bahwa pengeluaran anggaran pertahanan yang besar dapat memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan begitu pula sebaliknya, jika anggaran suatu negara terlalu kecil, maka akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Biasanya, cara mengukur besar atau kecilnya anggaran pertahanan secara umum yaitu berdasarkan total PDB. Anggaran pertahanan pada umumnya dialokasikan sebesar 1% dari total PDB (Benoit 1978:271). Benoit melakukan analisis tersebut dengan melihat beberapa variabel, yaitu industri pertahanan yang maju dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan industri lain yang saling bertautan di dalam rantai jaringan pasokan, mendorong inovasi, dan mengatasi defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh kegiatan perdagangan yang lebih banyak impor dibanding ekspor menjadi industri yang mandiri dan mampu melakukan lebih banyak ekspor.

Jadi, meskipun produk persenjataan Indonesia khususnya senjata api ringan sudah mulai diminati dengan jumlah

banyak, namun Indonesia masih lebih banyak melakukan impor senjata api ringan. Hal ini membuat pengeluaran militer lebih banyak teralokasikan untuk impor dan kebutuhan-kebutuhan lain dibandingkan untuk penelitian dan pengembangan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Small Arms Survey*, jenis senjata api ringan yang diimpor oleh Indonesia adalah senjata ringan seperti pistol atau *revolver* dan senapan runduk beserta dengan amunisi-amunisinya. Khusus untuk jenis ini, Indonesia merupakan importir terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan mencapai nilai \$791,8 juta dolar AS (Michael Picard 2019:48).

Eksportir terbesar jenis senjata ringan di wilayah Asia Tenggara dalam rentang tahun 2014-2016 justru adalah Filipina dengan total nilai \$94,9 juta dolar AS, Singapura dengan total nilai \$33,4 juta dolar AS, dan Thailand dengan total nilai \$25,1 juta dolar AS (Michael Picard 2019:48). Kawasan Asia Tenggara memang menjadi salah satu kawasan yang terus mengalami peningkatan belanja militer. Ketika pengeluaran militer global turun lebih dari 40% secara riil antara 1987 dan 1997, anggaran militer dari lima anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) meningkat lebih dari 75% secara riil selama periode itu (Winarno 2014: 44). Indonesia harus benar-benar fokus dalam melakukan alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan agar ketergantungan terhadap produk ataupun bahan baku dari luar negeri secara berangsur dapat berkurang.

Indonesia melalui strategi kebijakannya terkait industri strategis harus mengarahkan industri pertahanan yang berkolaborasi dengan industri swasta untuk melakukan penelitian dan pengembangan persenjataan dan segala kebutuhan pertahanan baik itu untuk

kebutuhan pertahanan Indonesia ataupun untuk kebutuhan perdagangan senjata. Sejauh ini, BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis) berafiliasi dengan industri-industri swasta untuk melakukan penelitian dan pengembangan.

Perusahaan utama yang mengarahkan produksi persenjataan dan segala kebutuhan terkait sistem pertahanan adalah PT. Pindad yang menangani senjata militer di darat, PT. PAL untuk alat-alat militer di laut, dan PT. Dirgantara Indonesia untuk senjata di udara. Berdasarkan data dari SIPRI, Indonesia mengalokasikan \$8,18 miliar dolar AS untuk belanja militer pada 2016, tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura yang menghabiskan \$9,96 miliar dolar AS (SIPRI 2019). Semua pihak yang terkait dengan industri pertahanan khususnya untuk mengoptimalkan perdagangan senjata Indonesia di kancah global baik itu dimulai dari komponen utama, pendukung, dan cadangan harus saling bersinergi dan membentuk mekanisme yang tidak terlalu kaku sesuai dengan konsep strategi pertahanan semesta agar segala proses birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

PT Pindad telah memproduksi berbagai macam senjata kecil, senjata ringan, dan amunisi. Produk-produk andalan PT Pindad di antaranya adalah amunisi berkaliber 5,56mm, Senapan Serbu (SS-2), dan Panser Anoa 6x6. Senapan Serbu (SS-2) menjadi produk senapan terlaris buatan Pindad yang sudah diekspor ke Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Iraq, Bangladesh, dan Myanmar. Sedangkan Panser Anoa sudah diekspor ke Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste, dan Oman (Ilyas Istianur Praditya 2017). Agar produk-produk ini dapat menjadi produk unggulan yang dipertimbangkan di pasar global, tentunya beberapa strategi yang

telah diuraikan di atas harus diimplementasikan secara bertahap. Ditambah lagi, forum-forum kerjasama regional, bilateral, maupun multilateral dapat dimanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan industri pertahanan.

Sesuai dengan konsep strategi pertahanan semesta, maka safari promosi senjata tidak harus selalu terpaku pada perwakilan dari Kementerian Pertahanan ataupun angkatan bersenjata. Sebagai contoh, di dalam agenda *Defence Service Asia* (DSA) 2014 di Kuala Lumpur, Malaysia, lima perusahaan BUMN, yaitu PT. Dahana, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pindad, PT. LEN Industri, dan PT. Dok Kodja Bahari, berkolaborasi dengan sepuluh perusahaan swasta yakni PT. Famatex, PT. Lundin Industry Invest, PT. Saba Wijaya Persada, PT. Sari Bahari, PT. Palindo Marine, PT. Indo Guardika Cipta Kreasi, PT. Infoglobal Teknologi Semesta, PT. Garda Persada, PT. Persada Aman Sentosa, dan PT. Daya Radar Utama, menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti pameran dan menunjukkan produk yang kompetitif di Asia Tenggara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2014b: 16)

Jadi, beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menciptakan produk senjata ringan yang berdaya saing global adalah melakukan pembenahan secara struktural terlebih dahulu di dalam tiga pilar utama industri pertahanan. Kemudian, meningkatkan anggaran penelitian dan pengembangan untuk menunjang kebutuhan inovasi dalam menghasilkan produk unggulan. Sebagai contoh, Senapan Serbu (SS-2) buatan PT Pindad merupakan hasil diversifikasi dari produk FNC dari FN Herstal agar Indonesia mampu menghasilkan produk senjata secara mandiri (Michael Picard 2019:47). Terakhir, untuk melakukan percepatan kemandirian industri pertahanan nasional, maka memerlukan kerja sama

sinergis antara pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri.

KESIMPULAN

Dinamika internal Indonesia dalam lingkup industri militer masih belum bisa memfasilitasi tujuan utama Indonesia dalam perdagangan senjata internasional yaitu sebagai pemasok senjata terkemuka di dunia, hal ini berbanding lurus dengan peran Indonesia dalam dinamika perdagangan senjata di kancah global yang kurang optimal, dengan bukti bahwa Indonesia lebih cenderung mejadi negara pengimpor senjata baik senjata ringan maupun berat dari negara maju. Namun dalam aspek ekspor senjata Indonesia belum bisa menghasilkan partisipasi yang aktif sebagai eksportir senjata internasional, meskipun telah adanya perkembangan dalam ekspor senjata terkhususnya dalam jenis senjata ringan.

Seharusnya persoalan industri pertahanan Indonesia harus melakukan perubahan struktural dalam tiga pilar utama industri pertahanan, alokasi anggaran pertahanan di bidang penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi dalam melakukan pengembangan industri pertahanan sebagai prioritas. Dalam hal ini Indonesia harus melakukan pembenahan antar lembaga dalam pemerintah, perubahan struktural terkait mekanisme ekspor persenjataan dan impor bahan baku untuk kebutuhan produksi persenjataan, perubahan mekanisme birokrasi yang masih terpaku pada konsep pemerintah ke pemerintah, fokus pada penelitian dan pengembangan sistem persenjataan dan segala kebutuhannya untuk menghasilkan produk persenjataan yang mampu berdaya saing dan adanya alokasi anggaran yang memadai dengan berbagai skema.

Sehingga mengupayakan penerapan strategi perang semesta

sebagai instrumen kebijakan yang melibatkan berbagai pihak dimulai dari komponen utama, komponen pendukung, dan komponen cadangan agar mampu mendongkrak perdagangan senjata Indonesia di kancah global. Hal ini juga akan berimbas pada peningkatan ekonomi negara. Sejauh ini, Indonesia lebih banyak melakukan impor senjata khususnya di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara peringkat satu dalam melakukan impor senjata ringan.

Referensi

- Aude Fleurant, Sam Perlo-Freeman, Pieter D. Wezeman, & Siemon T. Wezeman. 2016. *TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2015*.
- Benoit, E. (1978). Growth and Defense in Developing Countries. *Economic Development and Cultural Change*. <https://doi.org/10.1086/451015>
- Dilahwangsa, Z., Bhakti, I. N., & Pedrason, R. (2019). Asean defense industrial collaboration (adic) sebagai media diplomasi pertahanan negara anggota asean. *Jurnal Diplo*, 5(3), 1–28.
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI. 2018. *Laporan Tahunan 2018 Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan RI*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Edmonds, Martin. 1999. "Defence Privatisation: From State Enterprise to Commercialism." *Cambridge Review of International Affairs*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014a. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kennedy, P. S. J. (2017). Tantangan Pertahanan dan Ekonomi Indonesia Serta Kebijakan Yang Perlu Dilakukan. *Fundamental Management Journal*, 2(1), 67–74.

- Michael Picard, P. H. & F. M. (2019). *Trade Update 2019: Transfers, Transparency, and South-east Asia Spotlight* (Issue December).
- Pudjiastuti Nuke. 2019. *Keamanan Maritim ASEAN Dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*.
- Pahlawan, Indra, and Bayu Setya Setya. 2015. "Kerjasama Jerman Dan Indonesia Dalam Hal Pembelian Senjata Militer Untuk Modernisasi Alutsista TNI." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* 2(1): 1–9.
- Ridon Manik, Hipdizah, N. G. (2020). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) Dalam Rangka Promosi PT. Pindad. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1), 31–50.
- Sumarlan, S., Widodo, P., Akbar, F. V., & Pertahanan, U. (2019). Kebijakan politik penjualan senjata api kecil dan ringan indonesia dalam perdagangan senjata global. *Jurnal Industri Pertahanan*, 1(1), 47–74.
- Wezeman, P. D., Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N., & Wezeman, S. T. (2019). Trends in international Arms Transfer, 2018. *SIPRI Fact Sheet, March*, 101–126. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-101276-5.00003-x>
- World Bank 2019, "Military Expenditure (current USD) Indonesia".